



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. 7051783 Padang
perkimpertanahan.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 03/SK-PERKIMTAN/I/2023**

Tentang

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN dan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sumber dana APBD Tahun 2023 perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen yang dianggap mampu dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kelancaran pekerjaan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara tersebut pada Diktum Pertama bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan guna tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2023 dari segi fisik dan keuangan secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA
1. Tugas PPTK/PPKom dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa
 2. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi ;

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA/KPA
3. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi ;
- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
4. Tugas PPTK/PPKom dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan Kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja Penyedia
5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan 4, PPKom melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



RIFDA SURIANI, ST, Sp
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680516 199503 2 002

Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris, Kabid di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 03/SK-PERKIMTAN/1/2022
 Tanggal : 03 Januari 2023

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN
1	ELFITRI OKTAVIA, ST 19761002 201101 2 001	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	ANTOS LUKMAN, S.STP, MPA 19810530 199912 1 003	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi
3.	WIRDAWATI, SE 19691228 199203 2 008	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4.	FITRA YENIFA, SH, MM 19670610 200701 2 005	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan subyek dan obyek redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.	MARWANDI, ST 19790316 200604 1 021	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai 15 (Lima Belas) Ha <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan PKP 2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi 3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai 15 (Lima Belas) Ha <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai 15 (Lima Belas) Ha
6.	DANTAS, A.Md 19810608 200604 1 004	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Kota Padang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar)
7.	JIMMY HENDRICO, ST 19871229 201903 1 004	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kabupaten Tanah Datar)
8.	SRI RAHMANITA, ST 19830202 200902 2 001	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Kabupaten Pesisir Selatan) - Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kabupaten Pesisir Selatan)
9.	EFNI USLINDA, ST, M.Eng 19690517 199703 2 005	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh) - Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh)
10.	VIKY RAHMAT TIANDRA, ST 19840907 201101 1 002	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kabupaten Pasaman Barat)
11.	HARI SUSENO, ST 19820618 201101 1 004	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman) - Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman)
12.	RIO YULANDA, ST 19820113 200902 1 003	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kota Padang)
13.	YASRIL RAHIM, ST 19710314 199803 1 004	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok) - Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok)
14.	NASHIYATUL AL FATH, ST 19870708 201903 1 008	PPTK/ PPKom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto) - Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto)

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 RIFDA SURIANI, ST, SP
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19680516 199503 2 002